



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT DR. H. MOCH. ANSHARI SALEH BANJARMASIN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMONG WIBOWO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **876878**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.900.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/217 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>850.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.210.979.426</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.975.979.426</b>



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.975.979.426

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.